



## **ANALISIS BERLARUT-LARUTNYA PROSES PENANDATANGANAN KEMBALI MoU ANTARA INDONESIA-CINA DALAM MENANGGULANGI MASALAH NARKOBA PERIODE 2008-2015**

**Dea Tunjung Jatra Saputra**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **Abstract**

*Drug becomes important issues because they are threatening all around countries. A transnational drugs trafficking as in the fase of Indonesia-China conducted by an international syndicate resulted in a loss of both sides. On December 2, 2003 Indonesia and China agreed to sign a Memorandum of Understanding to combat transnational crime, cooperate of narcotics and drugs. Cooperation is carried out by The Indonesia National Police and The Ministry of Public Security of China. Cooperation agreed upon by the two countries was valid for five years, before needing a renewal on December 2, 2008. The resigning process has been slow where several factors have indicated that two governments might have not been fruitful. Based on data mining through interviews, the result of this research is process resignatories, because there are several factors such as the existence of the counter draft, distribution of authority through the Mutual Legal Assistance system and the differences in the system of government.*

**Keywords:** *drugs trafficking, Indonesia-China cooperation, Counter Draft.*

### **1. Pendahuluan**

Setelah era reformasi, Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih baik dari sebelumnya. Menjadi kesatuan bangsa yang utuh setelah pendapat atau aspirasi mulai dibebaskan, sehingga partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Era globalisasi sekarang ini memberikan banyak dampak masalah di kehidupan manusia, dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, pengetahuan hingga teknologi menjadi daerah yang rawan sehingga dibutuhkan hukum-hukum baru untuk mengatasi masalah dari berbagai bidang.

Beberapa permasalahan di era globalisasi tentunya menyusahkan bagi semua negara, terutama dalam menangani masalah kejahatan narkoba. Secara global menurut data *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak dalam bidang penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pada tahun 2012 terdapat 230 juta orang atau lima persen populasi di dunia

menggunakan narkoba dan 200.000 orang tiap tahunnya meninggal karena narkoba (www.unodc.com, 2012).

Pada tanggal 2 Desember 2003, Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dalam penanggulangan kejahatan antar negara dengan Cina.<sup>1</sup> Kerjasama ini dilakukan melalui nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) dan berlaku selama lima tahun. Masing-masing pihak diminta untuk bekerjasama dalam mencegah dan memerangi kejahatan transnasional, fokus pembahasan ini khususnya pada kejahatan narkoba. Indonesia dan Cina menyadari pentingnya kerjasama yang erat antara badan kepolisian dari kedua negara untuk secara aktif dan efektif mencegah serta memerangi kejahatan yang melibatkan kedua negara(www.interpol.go.id) dan kerjasama ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Kementerian Keamanan Umum Republik Rakyat Cina atau *Ministry of Public Security* (MPS).

Namun pada tanggal 2 Desember 2008, kerjasama ini perlu dilakukannya proses penandatanganan ulang kembali. Tujuan dari penandatanganan ulang tersebut yaitu, untuk membenahi pasal-pasal agar sesuai dengan permasalahan terbaru. Pada awal dilakukan perjanjian, kerjasama ini hanya berlaku selama lima tahun, lebih dari itu akan diperpanjang secara otomatis kecuali salah satu pihak memberitahu pihak yang lain secara tertulis keinginan untuk mengakhiri kesepakatan ini, setidaknya tiga bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini. Fungsi lain dari *reschedule* bagi tiap negara yang melakukan kerjasama adalah mempertimbangkan *benefit* atau bentuk imbal jasa yang didapat dari negara tersebut.

Sebelum pada akhir kerjasama Indonesia-Cina yang jatuh pada tanggal 2 Desember 2008, pihak NCB Interpol Indonesia selaku fasilitator Polri melakukan rapat untuk membahas perpanjangan MoU dengan Cina (Mabes Polri, 2008). Kepolisian Indonesia melakukan beberapa kali rapat dalam pembahasan kerjasama kembali dengan Cina, hasil dari rapat pertama tersebut yaitu (Bag Konviter Interpol, 2008): Pertama, rapat menyetujui bahwa MoU antara Polri dengan Cina akan diperpanjang dengan beberapa perubahan atau tidak tergantung dari masukan Satker (Satuan Kerja) terkait. Kedua, dalam bekerjasama dengan negara asing, perlu diperhatikan kesejajaran posisi antara kita dengan negara *partner*. Ketiga, penandatanganan perjanjian dengan Cina rencana akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Keempat, kerjasama dengan negara lain tersebut sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga ada manfaat yang diperoleh dari hubungan kerjasama tersebut, untuk itu perlu diperpanjang dan ditingkatkan.

Hasil dari rapat kedua yang diadakan pada tanggal 7 Oktober 2008 yaitu: Pertama, meningkatkan konsultasi dan koordinasi antara lembaga keamanan dan instansi pemerintah terkait dalam menghentikan aliran obat-obatan terlarang di daerah baik Indonesia maupun Cina. Kedua, saling mendukung kampanye anti narkoba dalam negeri, terutama dalam mengendalikan obat-obatan terlarang. Hasil dari Pokja (kelompok kerja) ini akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2008 kepada Hu Jintao selaku Presiden Cina disela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi *Asean-European Meeting* ke-7 yang berlangsung pada tanggal 24-25 Oktober 2008.<sup>2</sup> Dapat dikatakan Presiden RI memberikan perhatian khusus terkait penuntasan *Plan of Action*.

MoU sementara, pada tanggal 20 November 2008 dalam “Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian

---

<sup>1</sup> Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Keamanan Umum Republik Rakyat China

<sup>2</sup> Dir Jendral Asia Pasifik dan Afrika, Ibid.

Keamanan Umum Republik Rakyat Cina” telah dibuat dari hasil rapat-rapat sebelumnya. Hasil dari MoU sementara ini akan dievaluasi kembali dalam kegiatan Pokja agar menghasilkan *draft* perpanjangan Kesepakatan Bersama Polri-MPS Cina untuk selanjutnya akan diminta tanggapan kepada MPS Cina (Mabes Polri, 2008). Selanjutnya Rapat Pokja diadakan pada tanggal 20-21 November 2008 yang melibatkan banyak satker dari Markas Besar Polri, rapat ini menghasilkan hasil akhir penyusunan dan pembuatan MoU pasti yang akan diajukan ke pihak Cina. Perubahan pasal dan pergantian kata dalam makna yang berbeda turut dirubah dalam kesepakatan tersebut.

Namun dengan berjalannya waktu, Indonesia terlihat merubah kebijakannya untuk mempertimbangkan kembali kerjasama dengan Cina. Indonesia mempertimbangkan kembali kerjasama dengan Cina, terlihat ketika di tahun 2010 terdapat adanya perbedaan sistem hukum serta Cina yang komunis sangat terpusat peran politik birokrasi disana. Badan keamanan seperti polisi disana melakukan kerjasama pada tiap daerah namun harus melalui satu pintu yaitu di Beijing. Sehingga daerah keamanan tidak bisa melakukan sebuah penyeragaman apabila tidak ada utusan atau perintah dari pusat, kemungkinan besar ini alasan Indonesia mempertimbangkan dalam melanjutkan kerjasama kembali.

Dengan adanya perbedaan sistem pembagian pekerjaan dengan melalui satu pintu di Beijing memungkinkan jadi salah satu penghambat, sehingga terdapat indikasi mengapa penandatanganan ulang kerjasama Indonesia-Cina dalam menanggulangi kejahatan narkoba terkesan berlarut-larut, yaitu: Pertama, karena perbedaan sistem hukum serta Cina yang komunis sangat terpusat peran politik birokrasi disana. Badan keamanan seperti polisi disana, bekerja tidak cepat untuk melakukan kerjasama pada tiap daerah sehingga harus melalui satu titik pintu yaitu di Beijing. Kedua, operasi narkoba masih berjalan di Cina dengan modus TKI sebagai kurir di Cina tetap berjalan. Ketiga, ketertarikan Indonesia untuk melakukan kerjasama kembali dengan Cina, dilihat dari rapat Pokja yang diadakan tidak lagi dilanjutkan. Sehingga membuat Indonesia mempertimbangkan kembali kerjasama dengan Cina.

Berdasarkan pembahasan di atas, permasalahan yang dibahas yaitu apa penyebab penandatanganan ulang kembali MoU kerjasama Indonesia-Cina terkesan berlarut-larut?. Tujuan dalam pembahasan ini yaitu untuk mengetahui penyebab penandatanganan ulang kembali MoU kerjasama Indonesia-Cina terkesan berlarut-larut. Teori yang digunakan adalah Teori Neorealisme, teori ini diharapkan dapat menjelaskan tentang penyebab penandatanganan ulang kembali MoU kerjasama Indonesia-Cina dalam menanggulangi narkoba yang terkesan berlarut-larut. David A. Baldwin, dalam bukunya yang berjudul *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, menjelaskan enam titik fokus dalam perdebatan (Baldwin, 1993:4-7). Dari keenam fokus perdebatan antara neorealisme vs neoliberalisme, penelitian ini mengadopsi pandangan neorealisme pada isu perdebatan ketiga yaitu *relative vs absolute gains*. Kerjasama akan sulit dilaksanakan, karena tidak ada keseimbangan kekuatan antar negara serta kerjasama akan selalu menguntungkan negara yang memiliki kekuatan lebih besar (*disparity power*).

## **2. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini terdiri dari tiga bagian, di mana bagian I bertujuan untuk mengetahui terjadinya pendanaan terorisme di Indonesia. Bagian II akan melihat sejauh mana FATF berperan dalam menangani pendanaan teroris di

Indonesia, kemudian dilanjutkan bagian III yang berupaya menganalisa implementasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mematuhi rekomendasi FATF.

## **2.1 Kerjasama Indonesia-Cina dalam Menanggulangi Narkoba dan Kendala kendalanya**

Kerjasama yang dibangun kedua pihak meliputi pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi I-24/7. Selain itu kerjasama yang disetujui kedua pihak dalam MoU meliputi, operasi bersama, pengungkapan kasus, menangkap para tersangka, pelatihan untuk saling kunjung guna melakukan studi banding, saling mempelajari, bertukar pengalaman atau pengembangan kapasitas personel seperti seminar, *workshop* dan pelatihan serta kedua pihak diminta untuk memberikan dukungan teknologi dan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam penangkapan.

### **2.1.1 Implementasi Kerjasama**

Beberapa kerjasama yang telah di implementasikan yaitu, pertukaran informasi yang dilakukan kedua negara melalui jaringan I-24/7 untuk melakukan pencarian orang atau buronan serta pengungkapan kasus dan penangkapan para tersangka. Selain itu kerjasama yang telah di implementasikan adalah kunjungan kerja Cina dan operasi bersama yang digelar di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut terdapat agenda pertukaran informasi mengenai kejahatan narkoba Cina di saat itu.

#### **2.1.1.1 Jaringan Komunikasi Interpol I-24/7**

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina salah satunya melalui jaringan komunikasi Interpol I-24/7. Kesanggupan kepolisian untuk bertukar data yang krusial secara cepat dan aman adalah suatu landasan penegakan hukum internasional yang efektif. Sesuai dengan fungsi utama ICPO-Interpol yang pertama dan kedua yaitu memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian yang aman serta pelayanan data operasional dan *database* kepolisian merupakan upaya ICPO-Interpol untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggotanya melalui pertukaran informasi dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi canggih yang disebut dengan *Interpol Global Communication System* (IGCS) atau lebih dikenal dengan sebutan “I-24/7”. Nama “I-24/7” mengandung arti bahwa sistem jaringan komunikasi Interpol bekerja selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh negara anggota ICPO-Interpol dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional dan penegakan hukum (Polri, 2012).

Kerjasama Indonesia dan Cina dalam pertukaran informasi melalui jaringan I-24/7 merupakan salah satu cara yang efektif untuk melakukan penangkapan tersangka terutama dalam daftar pencarian orang. kejahatan transnasional khususnya kejahatan peredaran narkoba saat ini yang kian marak. Tak terhindarkan hukuman yang diberikan untuk para pelaku kejahatan ini dari hukuman mati adalah bukti keseriusan Indonesia dan Cina menanggulangi kejahatan narkoba. Hasil dari pengungkapan kasus dan penangkapan para tersangka adalah salah satu keberhasilan kerjasama Indonesia dan Cina melalui jaringan I/24-7. Kejahatan peredaran narkoba yang diorganisir oleh sindikat narkoba internasional perlu diatasi, sehingga kedua pihak harus selalu koordinasi secara terus menerus untuk mengungkap kasus dan menangkap para tersangka.

### 2.1.1.2 Operasi Bersama

Kerjasama selanjutnya yang dilakukan Indonesia-Cina adalah melakukan tindakan bersama untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Kedua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan tindakan bersama, dan kerjasama ini tertuang dalam MoU pasal 4. Tahun 2012 Cina melalui *Deputy Chief of Investigation Departement* (CID) datang ke Indonesia melakukan operasi bersama guna mengungkap kasus kejahatan (Sukmanto, 2012). Operasi bersama yang dilakukan Cina dengan Indonesia berjalan dengan baik. Perwakilan kunjungan Cina oleh CID untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia membuahkan hasil dengan diamankannya 60 warga negara Tiongkok dan 11 warga negara Cina. Dengan adanya tindakan lanjutan yang disepakati Indonesia dan Cina adalah salah satu bukti keseriusan dalam kerjasama untuk menangani kejahatan transnasional khususnya kejahatan narkoba.

### 2.1.1.3 Kunjungan Kerja

Dalam MoU yang disepakati antara Indonesia dan Cina terdapat kerjasama lain. Kerjasama lain yang telah dilakukan yaitu kunjungan NNCC (*National Narcotic Control Commission*) untuk melakukan pertukaran informasi dari kedua pihak. Berikut agenda kunjungan kerja dua hari NNCC di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Agenda Kunjungan Kerja NNCC di Indonesia**

Tanggal	Waktu	Keterangan
30 Oktober 2014	13.00-13.20	Courtesy Call dengan Kepala Direktorat Tindak Pidana Narkoba
	14.00-14.20	Courtesy Call dengan Kepala BNN
31 Oktober 2014	09.10-09.50	Kunjungan ke Balai Besar Rehabilitasi di Lido
	10.00-10.40	Kunjungan ke Balai Diklat di Lido

*Sumber: Badan Narkotika Nasional, 2014.*

Kunjungan kerja Cina, selain melakukan kunjungan ke balai besar rehabilitasi dan balai diklat, mereka melakukan pemaparan presentasi tentang situasi kejahatan narkoba di Cina. Selain itu NNCC juga memaparkan bagaimana upaya Cina dalam menanggulangi kejahatan narkoba dan obat terlarang. Setelah dilakukannya upaya, mereka juga memberikan gambaran hukuman di China bagi tersangka yang melakukan kejahatan tindak pidana narkoba.

### 2.1.2 Kendala – kendala Kerjasama

Asumsi dasar penelitian ini yaitu, mengatakan bahwa Indonesia dirugikan dalam melakukan kerjasama dengan Cina. Adanya penandatanganan ulang dengan Cina terkesan larut dalam hipotesis yaitu, karena Indonesia enggan melakukan kerjasama kembali karena merasa dirugikan. Namun setelah dilakukannya penelitian dan dilakukannya wawancara, berbeda dengan kenyataan yang ada bahwa kerjasama Indonesia dan Cina baik-baik saja dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya dalam beberapa sub bab akan membahas beberapa penyebab penandatanganan kembali dalam kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Cina terkesan lama.

#### **2.1.2.1 Counter Draft**

Proses penandatanganan kembali terkesan berlarut-larut atau terlalu lama disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Indonesia dan Cina saling *counter draft*. Proses *counter draft* adalah proses pembenahan ulang pada isi MoU yang terdiri dari beberapa pasal, untuk melakukan kerjasama mengatasi permasalahan yang semakin berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh petugas Interpol, yang mengatakan “Itu masalah isinya, isinya dalam pasal yang diperlukan perubahan sesuai perkembangan masalah.” Proses inilah yang membuat penandatanganan terkesan berlarut-larut.

*Counter draft* memerlukan proses yang panjang, khususnya di Indonesia karena tidak hanya melibatkan Kepolisian Bagian Divhubinter saja, namun dengan satuan kerja lainnya dan Kemlu pada Bagian Direktorat Perjanjian Internasional. Disamping itu, proses penandatanganan ulang memakan waktu yang lama karena baik Indonesia maupun Cina memiliki kepentingan masing-masing seperti dalam hal redaksional judul MoU.

#### **2.1.2.2 Pembentukan dan Penyesuaian Lembaga**

Pembagian kewenangan merupakan kendala bagi kelanjutan kerjasama dalam proses penandatanganan kembali. Dengan pembagian kewenangan maka diperlukan adanya koordinasi kembali dengan pihak yang lain, contohnya adanya pembentukan lembaga baru seperti BNN. Selain itu kendala lainnya adalah kesibukkan dengan rutinitas dari kementerian maupun lembaga.

#### **2.1.2.3 Faktor Lain**

Terdapat kendala lain yang mengakibatkan penandatanganan kembali antara Indonesia-Cina belum terlaksana. Beberapa kendala tersebut yaitu, adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Cina, pertemuan yang tidak rutin serta perbedaan pemerintahan masing-masing pihak. Jika dengan adanya pertemuan rutinitas minimal satu tahun sekali, akan mempercepat proses penandatanganan kembali. Kerjasama akan lebih efektif apabila terdapat pertemuan yang rutin, karena dalam pertemuan tersebut akan membahas permasalahan pada kerjasama tahunan.

### **3. Kesimpulan**

Indonesia dan Cina sepakat melakukan kerjasama melalui MoU pada 2 Desember 2003 dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan transnasional tersebut adalah menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba. Kerjasama yang dilakukan melalui MoU tersebut berlaku selama lima tahun, setelah itu kerjasama dilakukan penandatanganan ulang kembali. Proses penandatanganan ulang kembali dilakukan pada 2 Desember 2008, proses ini yaitu merevisi MoU pada setiap pasal-pasalnya dengan tujuan kerjasama sesuai dengan perkembangan masalah. Namun, pemerintah Republik Indonesia terkesan ragu-ragu untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Hal itu terbukti dari proses kesepakatan yang berlarut-larut sejak 2008 sampai dengan hari ini.

Berdasarkan asumsi neorealis, penelitian ini menduga faktor berlarut-larutnya kesepakatan tersebut adalah *disparity power* Indonesia-Cina. Neorealis menyatakan, bahwa kerjasama sulit dilaksanakan jika tidak ada keseimbangan kekuatan antar negara yang terlihat kerjasama akan menguntungkan negara yang memiliki kekuatan lebih besar. Selain itu dengan asumsi ini, begitu lamanya proses kesepakatan antara Indonesia-Cina disebabkan oleh *disparity power* antara kedua negara yaitu pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali kesepakatan tersebut karena

kerjasama akan menguntungkan Cina secara relatif mengingat perbandingan kapabilitas antara Indonesia dan Cina sangat timpang.

Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak terbukti. Hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa kerjasama ini menguntungkan kedua pihak. Terlebih lagi hubungan antara Indonesia dan Cina baik-baik saja. Hubungan antara Indonesia dan Cina cukup mendalam, karena status hubungan kedua negara adalah kemitraan strategis komprehensif, berbeda dengan negara-negara lainnya yang hanya mitra strategis atau mitra komprehensif saja. Berdasarkan data lapangan, terdapat faktor lain yang menyebabkan berlarut-larutnya proses kesepakatan tersebut. Penandatanganan ulang kembali terkesan berlarut-larut bukan dikarenakan *disparity power* antara Indonesia dan Cina, namun terdapat dua penyebab yang membuat penandatanganan terkesan berlarut-larut, yaitu: Pertama, proses pembenahan ulang pada isi MoU yang terdiri dari beberapa pasal, untuk melakukan kerjasama mengatasi permasalahan yang semakin berkembang atau *counter draft*. Proses ini didalamnya juga terdapat kendala-kendala seperti penambahan masalah kejahatan baru, banyaknya lembaga dan kementerian yang dilibatkan dalam proses *counter draft* dan proses penamaan kerjasama. Kedua, pembagian kewenangan melalui mekanisme MLA juga merupakan salah satu faktor kendala penandatanganan kembali terkesan lama dan ketiga kendala lainnya seperti perbedaan sistem hukum dan sistem pemerintah serta belum adanya SOP. Sehingga dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor teknis lebih berperan daripada distribusi kekuasaan antar negara.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Baldwin, David A. 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press.

### **Internet**

Interpol Indonesia. 2010. "Kesepakatan Bersama RI – Cina," <<http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/mou/223-kesepakatan-bersama-ri-china>>, diakses 12 Mei 2014.

Interpol Indonesia. 2012. "Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Polri Dengan BNN Tentang Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Interpol," <<http://www.interpol.go.id/id/berita/501-penandatanganan-nota-kesepahaman-antara-polri-dengan-bnn-tentang-pemanfaatan-jaringan-komunikasi-interpol>>, diakses 17 April 2015. Bag Konvinter Interpol. 2008. *Hasil Rapat Perpanjangan MOU Belanda, Australia, Cina dan Vietnam*. 14 Februari 2015.

UNODC. 2012. "World Drug Report," <[http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR\\_2012\\_web\\_small.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf)>, diakses 8 Maret 2015.

### **Dokumen**

Brigjen Pol. Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H., "Pelaksanaan tugas kerjasama Kepolisian RI-Kepolisian RRC dalam penanganan kejahatan transnasional yang dilakukan warga negara Cina-Taiwan di Indonesia," Laporan tidak dipublikasikan, Badan Reserse Kriminal Polri, 2012.

Chinese Ministry of Public Security, "Current Drug Situation and Narcotic Control Efforts in China," Presentasi disampaikan dalam kunjungan kerja di Indonesia, Bareskrim Polri Dittipid Narkoba, Jakarta, 30 Oktober 2014.

Dir Jendral Asia Pasifik dan Afrika (Kemlu). 2008. *Penyampaian **Clean Text** Draft Plan of Action Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC*. 17 Oktober 2014.

Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Kementerian Keamanan Umum Republik Rakyat China

Mabes Polri. 2008. *Rencana Penandatanganan Perpanjangan MOU Polri – Cina yang akan habis masa berlakunya pada bulan Desember 2008*. 18 November 2014.

Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri, Edisi ke 1 Jakarta:2012.